

Buletin **BSNP**

Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan

Vol.XIII/No.1/Maret 2018

ISSN: 0126-4605



Kebijakan USBN Tahun 2018

JOKO WIDODO:
Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Kekuatan Bangsa

**Komisi X DPR RI dan BSNP Sepakat
Perlu Dilakukan Penguatan Implementasi
Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah**

DAFTAR ISI

- 3 **KEBIJAKAN USBN TAHUN 2018**
- 6 **JOKO WIDODO: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUMBER KEKUATAN BANGSA**
- 8 **JUSUF KALLA: STANDAR SEBAGAI TOLOK UKUR DAN ACUAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL**
- 12 **SEBANYAK 276 PESERTA DARI 8 PROVINSI IKUT BIMTEK PENULISAN BUKU TEKS PELAJARAN K-13 DI SURABAYA**
- 14 **KOMISI X DPR RI DAN BSNP SEPAKAT PERLU DILAKUKAN PENGUATAN IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**
- 16 **MELALUI STANDARISASI, LKP DITUNTUT MENGHASILKAN LULUSAN YANG KOMPETEN, UNGGUL, DAN BERDAYASAING**
- 18 **RAKOR PELAKSANAAN UNBK 2018 PETUGAS HELP DESK HARUS TANGGUH DAN KOMPETEN**
- 20 **LENSA BSNP**

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan izin dan petunjukNya, Buletin BSNP edisi pertama tahun 2018 dapat hadir ke tangan pembaca tepat waktu. Pada edisi ini, Buletin BSNP mengangkat topik tentang Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI, dan kegiatan pengembangan standar. USBN tahun 2018 mengalami perubahan dibanding tahun 2017 sebagaimana diulas dalam hasil wawancara dengan Ketua BSNP. Sementara itu, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) telah terbukti efektif dalam meningkatkan indeks integritas bagi siswa dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan ujian. Lensa BSNP dalam bentuk foto, juga kami sajikan untuk melengkapi edisi ini. Selamat membaca.

Gambar Sampul: *Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) persiapan Ujian Nasional tahun 2018 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (21-22/2/2018), diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara dibuka oleh Kepala Balitbang Totok Suprayitno dan bertindak sebagai nara sumber adalah Ketua BSNP, Sekretaris Balitbang, dan Kepala Puspendik. Peserta Rakornas adalah para kepala dinas pendidikan, ketua pelaksana UN, dan pejabat pembuat komitmen dari 34 provinsi.*

Buletin BSNP
Buletin Resmi Badan Standar Nasional Pendidikan

Penanggungjawab
Bambang Suryadi

Pemimpin Redaksi
Kiki Yulianti

Redaksi Eksekutif
Zainal A. Hasibuan
Nanang Arif Guntoro
Zaki Su'ud
Khomsiyah

Redaksi Pelaksana
Teuku Ramli Zakaria

Penyunting/Editor
Titi Savitri Prihatiningsih
Erika Budiarti Laconi
Ipung Yuwono
Djoko Luknanto

Desain Grafis & Fotografer
Arief Rifai Dwiyanto
Ibar Warsita
Fiqih Trihanda

Sekretaris Redaksi
Ning Karningsih
Nurul Najmah

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Gedung D Lantai 2, Mandikdasmen, Jl. RS.
Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan

Email: info@bsnp-indonesia.org

Telp. (021) 7668590 Fax. (021) 7668591

Website: <http://www.bsnp-indonesia.org>

Kebijakan USBN Tahun 2018

Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tahun 2018 mengalami perbedaan yang sangat mendasar dibanding dengan USBN tahun 2017. Perbedaan yang paling ketara adalah jumlah mata pelajaran dan dimasukkannya jenjang SD/MI dan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Paket C/Ulya sebagai pelaksana USBN. Untuk mengulas lebih lanjut tentang kebijakan tersebut, Buletin BSNP melakukan wawancara dengan Bambang Suryadi Ketua BSNP. Berikut ini petikan wawancara tersebut yang disampaikan dengan gaya bertutur.

Bisa Bapak jelaskan, apa perbedaan mendasar pelaksanaan USBN tahun 2017 dan 2018?

Ada perbedaan mendasar pelaksanaan USBN tahun 2017 dan 2018. Dari segi mata pelajaran yang diujikan, pada tahun 2017 hanya mata pelajaran tertentu saja yang diujikan. Pada tahun 2018 seluruh mata pelajaran diujikan dalam USBN, kecuali pada jenjang SD/MI hanya tiga mata pelajaran yaitu, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Dengan demikian, satu mata pelajaran yang sama akan diujikan dalam UN dan USBN.

Pendidikan kesetaraan pada tahun 2017 tidak wajib melaksanakan USBN, tahun ini Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Paket C/Ulya, wajib melaksanakan USBN. Jika di sekolah formal soal USBN disusun oleh guru dan dikonsolidasikan oleh KKG atau MGMP, maka di pendidikan

kesetaraan soal USBN disusun oleh forum tutor.

Moda pelaksanaan USBN dapat dilakukan dengan ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer atau kombisa antara keduanya. Namun, aplikasi ujian berbasis komputer tidak disediakan oleh pusat.

Tahun 2017, POS USBN ditetapkan oleh Dirjen Dikdasmen. Tetapi tahun 2018 POS USBN ditetapkan BSNP. Bisa Bapak jelaskan, mengapa demikian?

Esensi USBN adalah penilaian oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan BSNP. Jadi USBN ini tidak bisa dipisahkan dari ketercapaian standar nasional pendidikan, khususnya standar kompetensi lulusan.

Selain itu, USBN diberlakukan untuk pendidikan formal maupun nonformal pada sekolah atau madrasah. Mengingat sekolah di bawah Ke-

menterian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan madrasah di bawah pembinaan Kementerian Agama, maka untuk menaungi kedua kementerian tersebut, POS USBN ditetapkan oleh BSNP.

Apa tujuan USBN, sementara pada waktu yang sama masih ada Ujian Nasional?

USBN merupakan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengukur capaian kompetensi siswa untuk seluruh mata pelajaran dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. Sebagai sub-sistem penilaian dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), USBN menjadi salah satu tolak ukur pencapaian Standar Nasional Pendidikan dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, USBN bertujuan untuk meningkatkan mutu ujian sekolah dan meningkatkan kompetensi guru dalam melakukan penilaian, khususnya kemampuan pengembangan soal ujian.

Apa peran BSNP dalam penyelenggaraan USBN?

Sebagai badan independen, dalam penyelenggaraan USBN, BSNP memiliki peran dan tugas menetapkan kisi-kisi USBN, menyusun dan menetapkan POS USBN, serta melakukan sosialisasi dan publikasi USBN bersama direktorat terkait.

Siapa yang menyusun soal USBN?

Soal USBN terdiri atas soal dari Pusat sebanyak 20-25 persen dan soal yang disusun oleh guru dari masing-masing satuan pendidikan sebanyak 75-80 persen. Penyusunan soal dari satuan pendidikan dikonsolidasikan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk jenjang SD/MI dan dikonsolidasikan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMA. Sedangkan untuk pendidikan kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya, soal USBN disusun oleh forum tutor.

Berapa jumlah soal Pilihan Ganda dan esai dalam USBN?

Jumlah soal dalam bentuk pilihan ganda sekitar 90% dan jumlah bentuk soal uraian/esai adalah 10%. Jika ada mata pelajaran yang memiliki 40

soal, maka soal pilihan ganda sebanyak 35 dan soal uraian sebanyak 5 soal.

Mengapa mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti SD/MI tidak diujikan dalam USBN? Apakah BSNP menganggap mata pelajaran tersebut tidak penting?

Pada jenjang SD/MI ada tiga mata pelajaran yang diujikan dalam USBN, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Selain tiga mata pelajaran tersebut, diujikan dalam Ujian Sekolah (US). Sedangkan mata pelajaran Agama dan Budi Pekerti untuk diujikan dalam USBN, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kementerian Agama. Artinya, jika Kementerian Agama akan menambahkan mata pelajaran Agama dan Budi Pekerti dalam USBN khusus untuk madrasah atau untuk madrasah dan sekolah, maka kebijakan tersebut ditentukan oleh Kementerian Agama. BSNP memosisikan seluruh mata pelajaran pada posisi yang sama pentingnya, sebab mata pelajaran tersebut merupakan alat untuk mencapai kompetensi lulusan.

Bagaimana proses pengembangan soal USBN?

Soal USBN disusun mengacu pada kisi-kisi USBN. Bentuk soal USBN terdiri atas Pilihan Ganda (PG) dan uraian. Sebanyak 20%-25% butir soal USBN disiapkan oleh Kementerian; kecuali untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti disiapkan oleh Kementerian Agama. Sebanyak 75%-80% butir soal disiapkan guru masing-masing satuan pendidikan dan dikonsolidasikan oleh KKG/MGMP, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Khusus soal mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, penyusunan 75%-80% butir soal, dilakukan oleh MGMP atau para guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti yang relevan di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Apa peran KKG/MGMP dalam pelaksanaan USBN?

Ada tiga peran utama yang dilakukan KKG/MGMP dalam pelaksanaan USBN. Pertama, menyusun indikator soal berdasarkan kisi-kisi

USBN ditetapkan BSNP. Kedua, menelaah soal USBN yang disusun oleh guru-guru dari satuan pendidikan. Ketiga, memfasilitasi guru-guru dalam perakitan soal dari Pusat (20-25 persen) dengan soal dari satuan pendidikan (75-80 persen).

Kapan jadwal pelaksanaan USBN?

USBN dilaksanakan sebelum atau sesudah pelaksanaan Ujian Nasional. Jadwal pelaksanaan USBN ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan zona/kluster MGMP. Penetapan jadwal USBN di masing-masing zona/kluster mempertimbangkan ketuntasan kurikulum, kalender akademik di masing-masing satuan pendidikan, hari libur nasional/keagamaan, dan jadwal ujian nasional. Dengan demikian pelaksanaan USBN di masing-masing zona/kluster dilakukan secara serentak. Khusus untuk USBN SD/MI dilaksanakan pada tanggal 3-5 Mei 2018.

Bagaimana pemeriksaan jawaban USBN untuk soal uraian/esai?

Soal bentuk uraian diperiksa secara manual oleh dua orang guru sesuai mata pelajarannya, mengacu pada pedoman penskoran. Jika terdapat selisih nilai antara kedua pemeriksa lebih dari 25%

dari skor maksimum, pimpinan satuan pendidikan menugaskan

pemeriksa ketiga. Nilai akhir soal uraian adalah rerata nilai dari semua pemeriksa.

Bagaimana pengolahan hasil USBN?

Nilai USBN merupakan gabungan nilai soal pilihan ganda dan nilai soal uraian, dengan rentang nilai 0 - 100. Sekolah menentukan pembobotan nilai pilihan ganda dan uraian dengan perbandingan yang proporsional

Apakah USBN dapat dilaksanakan dengan berbasis komputer?

USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer atau kombinasi ujian berbasis komputer untuk soal pilihan ganda dan berbasis kertas untuk soal esai.

Bagaimana pelaksanaan USBN berbasis komputer?

USBN dapat dilaksanakan dengan menggunakan komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak (software) untuk melaksanakan USBN. Pelaksanaan USBN-BK mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian, kesiapan infrastruktur, kesiapan aplikasi, dan kesiapan sumber daya.

Kapan pengumuman hasil USBN dari satuan pendidikan?

Pengumuman hasil USBN dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Pengumuman hasil USBN SD/MI sederajat pada tanggal 4 Juni 2018, SMP/MTs sederajat pada tanggal 28 Mei 2018, dan SMA/MA dan SMK/MAK sederajat pada tanggal 3 Mei 2018. Pengumuman hasil USBN pendidikan kesetaraan Program Paket A/Ula pada tanggal 14 Mei 2018 dan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya pada tanggal 7 Juni 2018. ●



**Ayo belajar
menghadapai
USBN dan UN**

JOKO WIDODO: Pendidikan dan Kebudayaan Sumber Kekuatan Bangsa

Catatan dari RNPk 2018



Joko Widodo Presiden Republik Indonesia menyampaikan arahan dan pesan kepada peserta RNPk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPk) di Sawangan, Depok (5-8/2/2018). Tema RNPk tahun ini adalah "Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan".

Kekayaan sumberdaya alam tidak bisa menjamin kesejahteraan dan kesuksesan sebuah bangsa. Lima unsur utama yang memajukan sebuah negara

adalah sumber daya manusia (SDM), stabilitas sosial dan politik, kepemimpinan dan manajemen pemerintah, IPTEKS, serta kreatifitas dan inovasi. Selain adanya pencapaian prestasi dalam bidang

pendidikan, kita juga masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Demikian pesan penting Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) yang diselenggarakan pada tanggal 5-8 Februari 2018 di Pusdiklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Sawangan, Depok. Tema RNPK 2018 adalah 'Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan'.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemdikbud, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala LPMP, Kepala P4TK, dan pemangku kepentingan bidang pendidikan di Pusat dan Daerah.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan peserta RNPK bahwa banyak negara maju yang justru alamnya keras dan tidak subur. Sebaliknya banyak sekali beberapa negara yang alamnya kaya raya: kaya tambang, minyak, dan gas justru didera kemiskinan dan konflik saudara.

"Kekayaan sumberdaya alam tidak bisa menjamin kesejahteraan dan kesuksesan sebuah bangsa. Oleh karena itu, jangan sampai sumber daya alam yang melimpah membuat kita malas, melemahkan daya juang dan membuat kita lemah dan tidak membuat kita kreatif", ucap Joko Widodo seraya menambahkan yang memajukan sebuah negara adalah SDM, stabilitas sosial dan politik, kepemimpinan dan manajemen pemerintah, IPTEKS, serta kreatifitas dan inovasi.

Lebih lanjut Joko Widodo mengatakan bahwa Pemerintah telah bekerja keras untuk meningkatkan layanan pendidikan, melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk menjamin akses pendidikan. Namun, Presiden juga mengakui bahwa pendidikan karakter masih

Kekayaan sumberdaya alam tidak bisa menjamin kesejahteraan dan kesuksesan sebuah bangsa. Lima unsur utama yang memajukan sebuah negara adalah sumber daya manusia (SDM), stabilitas sosial dan politik, kepemimpinan dan manajemen pemerintah, IPTEKS, serta kreatifitas dan inovasi.

--Joko Widodo Presiden Republik Indonesia--

memiliki PR yang besar dan perlu diselesaikan bersama, seperti kasus bullying, tawuran antar pelajar, dan hilangnya rasa hormat kepada guru di kalangan siswa. Oleh karena itu pendidikan mesti menghasilkan generasi yang memiliki daya juang dan sikap kebersamaan, kejujuran, dan kesantunan.

Terkait dengan kebudayaan, Presiden Joko Widodo berpesan sistem pendidikan harus menjadi jantung kebudayaan. Ekspresi seni dan budaya tidak boleh bergeser dari kebudayaan. Yang lebih penting lagi kita harus bisa memastikan pendidikan dan kebudayaan menjadi sumber kekuatan, persatuan, dan sumber memenangkan persaingan global. Anak-anak tidak boleh ketinggalan IPTEKS dan teknologi harus digunakan untuk memperkuat peradaban lokal kita. ●

JUSUF KALLA: Standar Sebagai Tolok Ukur dan Acuan Mutu Pendidikan Nasional

Kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNKP) tahun 2018 memberikan inspirasi dan menggugah para peserta untuk melakukan refleksi terhadap praksis pendidikan yang selama ini berlangsung. Jusuf Kalla mengupas berbagai isu pendidikan nasional, diantaranya pentingnya standar pendidikan nasional, isu anggaran pendidikan, pendidikan gratis, kompetensi siswa dan guru, dan perubahan kurikulum.

Menurut Jusuf Kalla, bicara pendidikan berarti kita bicara masa depan, bukan masa lalu. Dalam masa depan akan timbul persaingan antar orang, daerah dan negara. Persaingan ini hanya bisa diselesaikan melalui pendidikan. Pendidikan yang kita lakukan hari ini, hasilnya baru bisa kita rasakan sepuluh tahun kemudian. Oleh karena itu, mari kita melihat masa depan dengan mengambil pelajaran dari masa lalu.

Lebih lanjut Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa apa yang kita lakukan untuk pendidikan itu merupakan bentuk implementasi amanah konstitusi, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.

“Semua negara yang maju dan sejahtera selalu diawali dari kemajuan pendidikan yang memiliki nilai tambah dari pengetahuan dan teknologi. Kemajuan selalu dihubungkan dengan kecerdasan dan kecerdasan dihubungkan dengan pendidikan”, ucapnya seraya menambahkan melalui RNKP ini, perlu dibahas langkah langkah memajukan

pendidikan.

Jusuf Kalla meyakini betul bahwa untuk memajukan pendidikan perlu didukung dengan anggaran. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bidang pendidikan lebih dari 400 triliun rupiah. Namun, kenapa dengan anggaran yang naik setiap tahun kita belum mengalami kenaikan yang signifikan dalam bidang pendidikan dibanding negara lain?

“Negara Vietnam dari segi mutu pendidikan lebih tinggi dari Indonesia. Negara Filipina mampu mengirim tenaga kerja terampil, seperti mekanik dan perawat, sementara kita hanya mengirim tenaga asisten rumah tangga. Singapura dan Malaysia sudah menerapkan ujian dengan sistem Cambridge dan lain-lain, sementara kita masih bergelut dengan Ujian Nasional dengan berbagai perdebatannya”, ucap Wapres.

Standar Pendidikan

Menurut Jusuf Kalla, kondisi Indonesia yang heterogen, sangat memerlukan standar sebagai tolok ukur dan acuan mutu pendidikan nasional. Tanpa standar nasional pendidikan, kita tidak bisa mengetahui apa yang harus dicapai, sebab persaingan global yang terjadi sekarang itu adalah bagaimana melihat standar-standar di negara lain.

“Negara yang kualitas pendidikannya tinggi, pasti memiliki standar. Oleh karena itu, jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan, kita memerlukan standar”, ucap Wakil Presiden.

Lebih lanjut Jusuf Kall menjelaskan dua paham



Jusuf Kalla Wakil Presiden RI menyampaikan pesan kepada para peserta RNP di Sawangan (5-8/2/2018). RNP diikuti oleh para pemangku kepentingan bidang pendidikan di tingkat pusat dan daerah.

atau aliran dalam praksis pendidikan. Menurutnya ada dua paham pendidikan di dunia, yaitu paham *liberal arts* dan keterampilan (*skills*). Paham yang pertama, *liberal arts* banyak diterapkan di Amerika Serikat. Paham ini mendorong lahirnya berbagai inovasi. Oleh karena itu, jumlah mata pelajaran di sekolah di Amerika sedikit. Sementara itu, negara Jerman, Jepang, dan Korea lebih memilih paham kedua, yaitu keterampilan.

“Kedua paham ini memberikan kemajuan di bidang pendidikan. Hasil pendidikan dengan paham *liberal arts* adalah inovasi dan hasil dari pendidikan berbasis keterampilan adalah pekerja

yang kompeten”, ucapnya seraya menambahkan untuk kondisi Indonesia, diperlukan perpaduan antara kedua paham tersebut, sehingga bisa melahirkan lulusan yang inovatif dan terampil.

Kompetensi Siswa dan Guru

Pada kesempatan tersebut, Jusuf Kalla juga mengingatkan peserta RNP bahwa kompetensi siswa sekolah kita masih rendah. Wapres memberikan ilustrasi yang konkrit bahwa empat jalan tol yang rubuh dalam satu tahun lalu merupakan bukti nyata bahwa negara kita masih kekurangan tenaga ahli yang terampil.

Permasalahan guru SMK juga menjadi sorotan Wapres. Menurut Wapres pada saat negara Indonesia mau memperbanyak skill, diperbanyak pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), namun dari aspek guru, belum disiapkan dengan matang.

Terkait dengan kebijakan guru dengan keahlian ganda, Wapres memiliki pandangan yang berbeda. Pelatihan yang dilakukan selama dua atau tiga bulan, belum cukup untuk meningkatkan kompetensi guru. Selain masalah kompetensi guru, Indonesia saat ini juga mengalami permasalahan dengan jumlah guru.

“Kita masih berkuat dengan jumlah guru dan kesejahteraan guru. Sayangnya, kalau kita bicara tentang mutu guru, semua diam. Tetapi ketika kita bicara kesejahteraan guru, semua semangat bahkan ribut. Mestinya antara mutu dan kesejahteraan harus seimbang”, ucap Wapres seraya menambahkan untuk menangani masalah kekurangan guru, Wapres telah membicarakan dengan Menpan untuk diadakan pengangkatan guru.

Wapres juga mengingatkan bahwa untuk menjadi guru harus memiliki motivasi dan jiwa pendidik. “Sayang sekali banyak orang yang ingin jadi guru bukan karena panggilan jadi pendidik, tetapi karena mereka tahu kesejahteraan guru lebih baik daripada pekerjaan yang lain”, ucap Wapres yang langsung disambut dengan tepuk tangan dari para peserta RNKP.

Pendidikan Gratis

Isu lain yang disampaikan Wakil Presiden adalah masalah pendidikan gratis yang marak dijadikan janji kampanye para calon pemimpin daerah. Menurut Jusuf Kalla, konsep pendidikan gratis tidak bisa diterapkan bagi semua lapisan masyarakat.

“Pendidikan gratis itu tepat diterapkan bari masyarakat yang tidak mampu. Bagi masyarakat yang mampu, ya harus membayar biaya pendidikan, sehingga ada semacam subsidi silang. Orang tua pasti mau dan mampu berkontribusi asal sistem subsidi silang dilakukan secara terbuka dan

Apa yang kita lakukan untuk pendidikan itu merupakan bentuk implementasi amanah konstitusi, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.

Semua negara yang majudan sejahtera selalu diawali dari kemajuan pendidikan yang memiliki nilai tambah dari pengetahuan dan teknologi. Kemajuan selalu dihubungkan dengan kecerdasan dan kecerdasan dihubungkan dengan pendidikan

**--Jusuf Kalla Wakil
Presiden Republik
Indonesia--**

transnparan”, ucapnya.

Selama ini ada dua kelompok masyarakat dalam proses pendidikan, yaitu masyarakat yang menempuh pendidikan gratis (bebas biaya). Mereka ini yang belajar di sekolah-sekolah gratis, tetapi mutu pendidikan tetap rendah. Kedua

adalah kelompok masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke sekolah unggulan dengan biaya mahal.

“Konsep pendidikan gratis malah menimbulkan ‘kasta-kasta’ baru di masyarakat. Kasta premium dan kasta regular. Kasta favorit dan kasta tidak favorit. Dampaknya kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin semakin besar”, ucap Jusuf Kalla.

Untuk menangani permasalahan ini, menurut Jusuf Kalla, Pemerintah memberi perhatian kepada empat unsur pendidikan, yaitu penyediaan infrastruktur yang baik, penyediaan guru yang kompeten, penerapan sistem yang baik, dan input siswa yang baik pula.

Terkait dengan mutu pendidikan yang masih berpusat di pulau Jawa, Yusuf Kalla menawarkan supaya diadakan pertukaran atau rotasi guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah atau guru yang sukses memimpin satuan pendidikan di Jawa, bisa dikirim ke luar Jawa. Tentu hal ini memerlukan mekanisme dan prosedur yang jelas antar pemerintah daerah.

Pergantian Kurikulum

Bagi Jusuf Kalla kurikulum pendidikan merupakan sesuatu yang dinamis. Namun, tidak tepat jika setiap ganti menteri ganti kurikulum. Perubahan kurikulum mesti diikuti dengan peningkatan inovasi dan keterampilan.

“Kurikulum masa depan itu harus mampu menumbuhkan inovasi dan keterampilan bagi lulusan satuan pendidikan. Jangan malah menimbulkan masalah bagi guru dan siswa”, ucap Yusuf Kalla.

Salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam menerapkan kurikulum adalah jika ada perubahan pada diri siswa. “Jika murid pada saat masuk sekolah kurang pintar, tetapi pada saat keluar jadi pintar, artinya sekolah itu sudah berhasil melakukan pendidikan”.

Wakil Presiden mengakhiri sambutannya dengan mengajak seluruh peserta RNKP untuk memikirkan bangsa ini ke depan. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan yang ada sekarang. ●



Peserta RNKP 2018 menyimak arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Sebanyak 276 Peserta dari 8 Provinsi Ikut BIMTEK Penulisan Buku Teks Pelajaran K-13 di Surabaya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan telah ditetapkan. Saat ini UU tersebut sedang dijabarkan ke dalam Rancangan Peraturan Pemerintah agar bisa menjadi acuan yang lebih operasional demi terwujudnya ekosistem perbukuan. Dengan adanya undang-undang tersebut peran serta masyarakat dalam menyediakan buku teks pelajaran semakin penting dalam pengadaan buku teks pelajaran. Peran ini dapat dilakukan oleh penerbit dengan mengadakan buku teks pelajaran yang berkualitas.

Menurut UU tersebut, buku teks pelajaran sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat kelayakan isi, yaitu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak mengandung unsur kekerasan, tidak mengandung ujaran kebencian, tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan, serta tidak mengandung unsur pornografi.

Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) merespon regulasi tersebut dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penulisan buku teks pelajaran, yang dilaksanakan di Surabaya pada hari



Rosidayati Rozalina Ketua Umum IKAPI Pusat menyampaikan sambutan dalam acara Bimtek Penulisan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 di Surabaya, Sabtu, 17 Februari 2018.

Sabtu (17/2/2018). Kegiatan ini dilaksanakan oleh IKAPI Jawa Timur bekerja sama dengan BSNP dan Puskurbuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum ini, IKAPI Jawa Tengah juga menyelenggarakan kegiatan serupa yang dikemas dalam bentuk Seminar Sehari Tentang Pembekalan Kepada Penulis dan Editor Mengenai Implementasi Prinsip-Prinsip Kurikulum 2013 dalam Buku Teks Pelajaran di Solo pada hari Sabtu (28/10/2017).

Menurut Ketua Panitia Mursyid Burhanuddin kegiatan ini sengaja kami buat lebih teknis. Karena model seminar atau ceramah misalnya, memiliki sejumlah keterbatasan. Bahkan, para penulis, editor dan penerbit sangat menantikan kegiatan yang lebih teknis dan aplikatif. Yang dapat membekali mereka dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan buku-buku yang berkualitas dan sesuai dengan standar pemerintah.

Lebih lanjut Mursyid Burhanuddin mengatakan tujuan Bimtek ini adalah untuk meningkatkan keterampilan penulis, editor dan penerbit di dalam menerbitkan buku-buku teks yang berkualitas. Selain itu, juga untuk meningkatkan angka partisipasi dan angka kelulusan penerbit dalam kegiatan penilaian buku teks kurikulum 2013. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong terciptanya ekosistem perbukuan yang lebih bergairah dengan terbitnya buku-buku berkualitas dan sesuai dengan standar pemerintah.

Antusiasme penerbit, tambah Mursyid, untuk mengikuti Bimtek sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya peserta dari 8 provinsi dari wilayah Jawa dan Luar Jawa. "Acara ini diikuti 276 orang peserta dari delapan provinsi, termasuk Provinsi Maluku dan Sumatera Barat", ucap Mursyid seraya menambahkan sebagai persiapan Panitia Bimtek telah melakukan audiensi dengan Saki Su'ud pada tanggal 17 Januari 2018 di BSNP.

Sementara itu, Rosidayati Rozalina Ketua Umum IKAPI Pusat mengatakan bahwa tinggi antusiasme peserta dalam kegiatan ini menunjukkan industri penerbitan buku di daerah berkembang dengan pesat. Peran IKAPI adalah memberikan pembinaan melalui lokakarya, seminar, pameran, dan workshop



tentang buku teks pelajaran. Selain itu, IKAPI juga memiliki kewajiban untuk mengawal kebijakan pemerintah tentang pengadaan buku teks pelajaran, termasuk penerapan kode etik bagi para penerbit, penulis, dan editor.

Materi Bimtek dikemas dalam berbagai topik, diantaranya adalah kebijakan perbukuan yang disampaikan oleh Supriyatno Kepala Bidang Perbukuan dalam kapasitasnya mewakili Awaluddin Tjalla, Kepala Puskurbuk. Zaki Su'ud anggota BSNP menyampaikan materi tentang Metode Praktis Penulisan Buku Teks Kurikulum 2013 dan Kelayakan Isi Buku Teks Pelajaran. Sedangkan materi tentang kelayakan penyajian buku teks pelajaran disampaikan oleh Mohammad Syaifuddin. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu jenjang SD, SMP, dan SMA. Para nara sumber menyampaikan materi untuk ketiga kelompok tersebut.

Menurut Zaki Su'ud dalam upaya menjaga standar buku teks pelajaran, BSNP dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan telah membuat kebijakan model penilaian dengan Pola Inisiatif Masyarakat. Dengan pola ini, setiap penerbit bisa mengajukan penilaian kapan pun saja, tanpa dibatasi oleh judul buku dan waktu. ●

Komisi X DPR RI dan BSNP Sepakat Perlu Dilakukan Penguatan Implementasi Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah

Pembahasan tentang kebijakan, pencapaian, dan permasalahan standar nasional pendidikan selalu menarik perhatian publik. Hal ini karena isu pendidikan nasional menyangkut kepentingan berbagai pihak, mulai dari pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Bertempat di Gedung Nusantara I Komplek DPR RI, pada hari Rabu (31/1/2018), Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN S/M) melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI. Ada empat agenda pembahasan, yaitu kebijakan, peta pengembangan, pencapaian, dan permasalahan standar nasional pendidikan dasar dan menengah. Turut hadir dalam RDPU ini delapan anggota BSNP dan tiga belas anggota BAN S/M.

Abdul Fikri Fakhri Pimpinan sidang mengatakan tujuan RDPU ini adalah untuk melakukan evaluasi tentang standar nasional pendidikan dasar dan menengah.

“Komisi X DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan, pencapaian, dan permasalahan standar nasional pendidikan dasar dan menengah”, ucapnya.

Dalam bekerja, tambahnya, Panja memandang perlu untuk mendapatkan informasi dan data dari BSNP dan BAN S/M sebagai badan yang memiliki kewenangan mengembangkan dan mengukur pencapaian standar nasional pendidikan. Menurut

Abdul Fikri, ada beberapa pertanyaan yang perlu mendapat penjelasan dari BSNP, diantaranya adalah: Bagaimana kesiapan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam upaya penyusunan dan penentuan langkah strategis untuk mengelola Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai amanah dari UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas? Adakah kendala yang dihadapi dalam penyusunan SNP tersebut?; Bagaimana cara BSNP menentukan tolak ukur penentuan SNP? Apakah telah dilakukan kajian dan percobaan sebelum SNP menjadi sebuah

Hasil akreditasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam membuat perencanaan program pendidikan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun satuan pendidikan.

--**Bambang Suryadi**
Ketua BSNP--



Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BSNP, BAN S/M dan Panja Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI (31/1/2018). Dua standar nasional pendidikan yang pencapaiannya masih rendah adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana.

kebijakan yang siap diimplementasikan?

Selain itu, Panja juga ingin menggali tentang bagaimana langkah BSNP agar kebijakannya implementatif untuk mewujudkan pemenuhan 8 SNP di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di daerah 3T?; dan kendala apa saja yang dihadapi BSNP dalam penyusunan SNP dan kendala apa saja yang menjadi evaluasi BSNP dari para pemangku kepentingan dalam mengimplementasi SNP tersebut?

Bambang Suryadi Ketua BSNP menyatakan sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia adalah pendidikan berbasis standar, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Setelah lima belas tahun pendidikan berbasis standar diterapkan, masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan mulai dari hulu sampai hilir”, ujar Bambang.

Permasalahan di hulu, tambahannya, masih

ditemukan ketidaklarasan antara dokumen Standar Nasional Pendidikan dengan dokumen kurikulum. Oleh karena itu, BSNP selalu melakukan evaluasi terhadap standar nasional pendidikan yang telah dikembangkan.

Selain itu, permasalahan di hilir lebih terfokus pada masalah implementasi SNP. Pemahaman para pemangku kepentingan terhadap SNP masih beragam. Hal ini salah satunya disebabkan terbatasnya sosialisasi tentang SNP.

Sementara hasil akreditasi BAN S/M menunjukkan pemenuhan standar pendidik dan standar sarana dan prasarana masih rendah dibandingkan enam standar nasional lainnya, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Namun demikian, hasil akreditasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam membuat perencanaan program pendidikan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun satuan pendidikan. ●

Melalui Standarisasi, LKP Dituntut Menghasilkan Lulusan yang Kompeten, Unggul, dan Berdayasaing

BSNP bersama Direktorat Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sepakat untuk melakukan penguatan LKP melalui pengembangan standar nasional pendidikan secara komprehensif. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pleno BSNP (22-23/1/2018) di Jakarta untuk membahas desain kegiatan pengembangan standar LKP. Turut hadir dalam acara tersebut adalah para nara sumber, yaitu Surono Ketua Komisi Perencanaan dan Harmonisasi Kelembagaan dari BNSP, Supriyono Ketua BAN PAUD dan PNF, Sutio dari Kementerian Tenaga Kerja, dan Heidi M. Idris Kepala Pusat Literasi dan

Profesi Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Yusuf Muhyiddin Direktur Pembinaan LKP menyebutkan saat ini ada 73 jenis keterampilan dan 19.818 LKP yang sudah memiliki nomor induk lembaga kursus dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan Masyarakat (DAPODIKMAS). Namun, belum seluruh depalan jenis standar nasional pendidikan untuk LKP dikembangkan. Oleh karena itu, penguatan LKP melalui pengembangan SNP mesti menjadi prioritas utama.

“Saat ini standar nasional pendidikan untuk LKP yang sudah dikembangkan adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, dan standar sarana dan prasarana. SKL dikembangkan dengan

Saat ini ada 73 jenis keterampilan dan 19.818 Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sudah memiliki nomor induk lembaga kursus dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan Masyarakat (DAPODIKMAS). Namun, belum seluruh depalan jenis standar nasional pendidikan untuk LKP dikembangkan. Oleh karena itu, penguatan LKP melalui pengembangan SNP mesti menjadi prioritas utama.

**--Yusuf Muhyiddin, Direktur Pembinaan LKP,
Kemdikbud--**

mengacu, salah satunya, pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)”, ucap Yusuf seraya menambahkan pihak direktorat menyambut positif rencana BSNP untuk mengembangkan delapan SNP bagi LKP.

Sementara itu, Khomsiyah anggota BSNP sekaligus sebagai koordinator kegiatan mengatakan ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan SNP untuk LKP. Diantara isu tersebut adalah kualifikasi akademi dan kompetensi tutor, akreditasi lembaga, dan sertifikasi lulusan dari LKP.

“Menyadari kondisi LKP di lapangan saat ini,

BSNP ingin melakukan penguatan LKP melalui pengembangan SNP secara komprehensif. Artinya, delapan standar nasional yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan dan standar pembiayaan, perlu segera dikembangkan”, ucap Khomsiyah.

Melalui penguatan ini, tambahnya, kita berharap LKP yang ada dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, unggul, dan berdaya saing, baik di skala nasional maupun internasional. ●



Pembahasan desain pengembangan standar Kursus dan Pelatihan di BSNP. Turut hadir dalam acara ini Direktur Pembinaan LKP, Ketua BAN PAUD PNF, perwakilan dari BSNP, Kementerian Pekerjaan Umum, dan anggota BSNP.

RAKOR PELAKSANAAN UNBK 2018

Petugas *Help Desk* Harus Tangguh dan Kompeten

Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi para petugas layanan (*help desk*) di Surabaya (22-25/1/2018). Acara diikuti perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kementerian Agama di 34 provinsi.

Melalui acara ini diharapkan para petugas *help desk* UNBK dapat menyamakan persepsi dan pemahaman tentang Prosedur Operasional Standar (POS) UNBK dan dapat memberikan solusi jika terjadi permasalahan teknis.

Bertindak sebagai nara sumber adalah Totol Suprayitno Kepala Balitbang, Bambang Suryadi Ketua BSNP, Muhammad Abduh Kepala Puspendik dan tim UNBK dari Puspendik.

Totok Suprayitno dalam sambutannya menegaskan bahwa moda utama pelaksanaan UN tahun 2018 adalah dengan UNBK. “Moda utama pelaksanaan UN tahun 2018 adalah dengan UNBK, baik untuk pendidikan formal maupun nonformal”, ucapnya.

Menurut Totok moda UNBK menjadi arus utama (*main streaming*) dalam pelaksanaan UN karena telah terbukti UNBK efektif untuk meningkatkan integritas dalam pelaksanaan ujian nasional. Bahwa dalam kenyataannya nanti

Peran utama petugas *help desk* adalah memberikan layanan informasi dan penanganan masalah yang terkait dengan pelaksanaan UNBK. Petugas *help desk* harus tangguh dan kompeten sehingga setiap ada permasalahan teknis dapat segera diatasi dan tidak ada peserta ujian yang dirugikan.

**--Bambang Suryadi
Ketua BSNP--**



Pelaksanaan UNBK di salah satu sekolah di Jakarta. UNBK menjadi moda utama pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2018.

masih ada satuan pendidikan yang belum bisa melaksanakan UNBK, maka satuan pendidikan yang bersangkutan bisa melakukan UN dengan berbasis kertas dan pensil.

Sementara itu, Bambang Suryadi dalam paparannya menegaskan peran petugas *help desk* sangat penting dalam menyukseskan pelaksanaan UNBK.

“Petugas *help desk* harus tangguh dan kompeten sehingga setiap ada permasalahan teknis dapat segera diatasi dan tidak ada peserta ujian yang dirugikan”, ucapnya seraya menambahkan peran utama petugas *help desk* adalah memberikan layanan informasi dan penanganan masalah yang terkait dengan pelaksanaan UNBK.

Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan dalam POS UN 2018, diantara kriteria petugas *help desk* adalah memiliki integritas, komitmen, dan pemahaman yang baik tentang POS UN. Petugas *help desk* dibentuk pada level panitia tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Prinsip Berbagi Sumber

Salah satu kebijakan yang ditetapkan BSNP untuk meningkatkan pelaksanaan UNBK adalah dengan menerapkan prinsip berbagi sumber (*resource sharing*). Prinsip ini dapat dilaksanakan secara lintas jenjang dan jenis pendidikan.

“UNBK SMA dapat dilaksanakan di SMA atau sebaliknya. Demikian juga UNBK SMP dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber milik SMA atau SMK. Bahkan PKBM pada pendidikan nonformal dapat menggunakan fasilitas milik pendidikan formal, seperti SMP, SMA atau SMK”, ucap Bambang.

Dengan prinsip berbagi sumber ini jumlah satuan pendidikan pelaksana UNBK dapat ditingkatkan. Namun, penerapan prinsip berbagi sumber tidak boleh terjadi transaksi yang memberatkan salah satu pihak, misalnya dengan menetapkan sejumlah biaya tertentu untuk setiap peserta ujian. ●

LENSA



Ketua BSNP Bambang Suryadi menyampaikan kebijakan tentang Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tahun 2018 dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Sawangan, 5-8 Februari 2018. Seluruh mata pelajaran diujikan dalam USBN untuk semua jenjang, kecuali jenjang SD/MI yang meliputi tiga mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.



BSNP dan BAN S/M menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPD) Panja Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI pada tanggal 31 Januari 2018. Ada empat agenda yang dibahas dalam RDPD, yaitu kebijakan, peta pengembangan, pencapaian, dan permasalahan standar nasional pendidikan dasar dan menengah.

BSNP



Kepala Balitbang Kemdikbud Totok Suprayitno memberikan sambutan dan arahan kepada peserta rapat koordinasi nasional persiapan Ujian Nasional 2018. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) menjadi moda utama dalam pelaksanaan UN . Pada jenjang SMK, sebanyak 18 Provinsi melaksanakan UNBK 100 persen.



Pembahasan desain pengembangan standar nasional pendidikan untuk lembaga kursus dan pelatihan yang menjadi salah satu prioritas program kerja BSNP tahun 2018. Turut hadir dalam acara ini Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Yusuf Mahyuddin (pertama dari kiri), Ketua BAN PAUD PNF Supriyono (kedua dari kiri), dan Surono anggota BSNP (keempat dari diri).

LENSA



Pembahasan desain pengembangan standar nasional pendidikan untuk pendidikan khusus dan layanan khusus di BSNP. Turut hadir dalam acara ini Kepala Balitbang Kemdikbud Totok Suprayitno, akademisi, dan direktur PKLK. Pengembangan standar PKLK akan dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Oktober 2018.



Suasana perpisahan Erika Budiarti Laconi anggota BSNP periode 2014-2018 (ketiga dari kanan). Turut hadir dalam acara ini Kepala Balitbang Kemdikbud Totok Suprayitno (keempat dari kanan) dan Sekretaris Balitbang Dadang Sudiyarto dan Direktur PKLK (kelima dari kanan) di ruang sidang BSNP (29/1/2018). Mulai tanggal 2 Februari 2018, Erika Budiarti Laconi mengemban amanat baru sebagai Wakil Rektor IV IPB.

BSNP



Para reviewer dari akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan bidang pendidikan melakukan penelaahan rancangan Standar Isi SMK/MAK di Jakarta (24-25/2/2018). BSNP bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan SMK mengembangkan delapan standar nasional pendidikan SMK/MAK. Kegiatan ini dimulai pada bulan Januari sampai dengan Maret 2018.



Diskusi kelompok terpumpun tentang rancangan standar pengelolaan SMK/MAK yang diselenggarakan oleh BSNP bersama Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta (24-25/2/2018). Salah satu isu menarik dalam standar pengelolaan SMK/MAK adalah pengelolaan keuangan dalam konteks satuan pendidikan sebagai satuan kerja (Satker) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

**Selamat menempuh
Ujian Sekolah Berstandar Nasional
(USBN) dan Ujian Nasional (UN)
tahun pelajaran 2017-2018**



**Prestasi Penting,
Jujur yang Utama !**

ISSN 0126-4605



9 770126 460552

BSNP

<http://www.bsnp-indonesia.org>